



**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 527 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

NOMOR : 29/RENJA-BPKD/2021

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 527/TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Renja-PD";
- KEDUA : Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan Nomor Renja-PD, dengan urutan nomor Renja-PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Renja-PD merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kota untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang di mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian masing-masing dokumen disusun berdasarkan Nomor Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
- KEEMPAT : Renja-PD digunakan sebagai:
a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2021;
b. pedoman Penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021; dan
c. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- KELIMA : Dokumen Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) masing-masing;
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal / Desember 2020
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

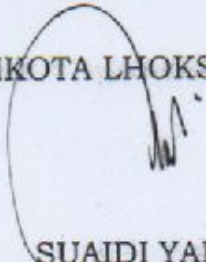
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 527 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NOMOR RENJA	SKPK	KET
1	2	3	4
1	01 / Renja-PK/2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	02/ Renja-Dinkes/2021	Dinas Kesehatan	
3	03/Renja-PUPR/2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4	04/Renja-Kesbangpol/2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	05/Renja-Kantor Satpol PP/2021	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
6	06/Renja-Dinsos/2021	Dinas Sosial	
7	07/Renja-PMPTSP/2021	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	
8	08/Renja-PP,PA,PP & KB/2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	09/Renja-DKPP & Pangan/2021	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
10	10/Renja-Pertanahan/2021	Dinas Pertanahan	
11	11/Renja-DLH/2021	Dinas Lingkungan Hidup	
12	12/Renja-Disduk-Capil/2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	13/Renja-DPMG/2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
14	14/Renja-DP3A,P2&KB/2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	15/Renja-Dishub/2021	Dinas Perhubungan	
16	16/Renja-Diskominfo/2021	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
17	17/Renja-Disperindagkop/2021	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

18	18/Renja-Disporapar/2021	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19	19/Renja-Arpus/2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	20/Renja-Setdako/2021	Sekretariat Daerah Kota
21	21/Renja-Sekwan/2021	Sekretariat DPRK
22	22/Renja-Banda Sakti/2021	Kecamatan Banda Sakti
23	23/Renja-Muara Dua/2021	Kecamatan Muara Dua
24	24/Renja-Blang Mangat/2021	Kecamatan Blang Mangat
25	25/Renja-Muara Satu/2021	Kecamatan Muara Satu
26	26/Renja-BPBD/2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	27/Renja-Inspektorat/2021	Inspektorat
28	28/Renja-Bappeda/2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	29/Renja-BPKD/2021	Badan Pengelola Keuangan Daerah
30	30/Renja-BKPSDM/2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	31/Renja-DSI & Pendidikan Dayah/2021	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
32	32/Renja-MPU/2021	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
33	33/Renja-Baitul Mal/2021	Sekretariat Baitul Mal
34	34/Renja-MAA/2021	Sekretariat Majelis Adat Aceh
35	35/Renja-MPD/2021	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2021 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2021 ini diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Lhokseumawe, 2 Desember 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**

Ir. MARWADI YUSUF, M.Si

NIP. 19641118 199301 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	33
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi . .	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah . . .	36
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pelaksana pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMK serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMK dan RKPK. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal Perangkat Daerah. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRK Lhokseumawe.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan pertama yaitu persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan akhir renja Perangkat Daerah. Tahapan Terakhir adalah penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPK dan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan seperti Renstra Perangkat Daerah, RKPK dan RPJMK. Maka, dalam proses penyusunannya Renja Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Kota (APBK) serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBA Propinsi dan APBN.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dalam satu tahun anggaran. Renja juga mempunyai arti yang strategis karena merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
11. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020
25. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah dan menjadi alat ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. sebagai rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk Tahun 2021.
2. sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021.
3. sebagai dokumen pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan turunan dari RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPK, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPK dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPK.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2019, Perangkat Daerah telah melaksanakan 10 program dan 66 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp.10.856.568.462,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.196.331.527,- (Sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah sebesar 93,92 % yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat diuraikan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program / kegiatan yang direncanakan telah memenuhi kriteria target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 11.310.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.226.000,- atau 99,26% dengan output Periode

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 525.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 400.086.254,- atau 76,15% dengan output Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 416.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 407.700.000,- atau 97,98% dengan output Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD 49 orang atau 588 OB terealisasi sebanyak 49 orang atau 588 OB atau 100%.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 119.800.000,- terealisasi sebesar Rp.119.152.840,- atau 99,46% dengan output Periode Penyediaan Alat tulis Kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.522.000,- atau 88,73% dengan output Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.611.750,- terealisasi sebesar Rp. 20.611.750,- atau 100% dengan output Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100% dengan output Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan

Perundang-Undangan 365 eks terealisasi sebanyak 365 eks atau 100%.

- Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana anggaran sebesar Rp.69.900.000,- terealisasi sebesar Rp.46.862.500,- atau 67,04 % dengan output Periode Penyediaan Makanan dan Minuman selama 11 bulan terealisasi selama 11 bulan atau 100%.
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 307.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 306.748.900,- atau 99,76% dengan output Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Penyediaan jasa pegawai tidak tetap dari rencana anggaran sebesar Rp. 876.600.700,- terealisasi sebesar Rp. 715.013.200,- atau 81,57 % dengan output Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap 150 Org atau 1.800 OB selama 10 bulan terealisasi sebanyak 150 orang atau 1.800 OB selama 10 bulan atau 100 %.

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 Kegiatan yaitu:

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 777.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 769.505.780,- atau 99,68% dengan output Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 7 unit terealisasi 7 unit atau 100%.
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 443.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 435.720.625 atau 98,36% dengan output Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 5 jenis terealisasi 5 jenis atau 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 405.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 397.113.313,- atau 98,05% dengan output Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 178.331.762,- terealisasi sebesar Rp. 172.626.500,- atau 96,80% dengan output Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional 7 Unit atau 84 UB terealisasi 7 unit atau 84 UB atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 83.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.648.800,- atau 96,24% dengan output Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.990.000,- atau 99,88% dengan output Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- c) Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan rencana anggaran sebesar Rp. 230.717.500,- terealisasi sebesar Rp. 206.972.790,- atau 89,70% dengan output Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 458 pasang yang terealisasi sebanyak 414 pasang, telah memenuhi untuk kebutuhan PNS dan tenaga THL atau 100 %.

d) Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja, terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan rencana kerja (Renja) satuan kerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100 % dengan output Jumlah Buku RENJA Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Penyusunan standar operasional prosedur (SOP), Administrasi Pemerintah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.172.000,- atau 87,81 % dengan output sebanyak 1 Dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

e) Program efektifitas pengeluaran daerah, yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- Verifikasi Dokumen penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe anggaran sebesar Rp. 118.862.400,- terealisasi sebesar Rp.116.534.198,- atau 98,65% dengan output 4 Triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.
- Penataan fungsi Pengelolaan Kas anggaran sebesar Rp. 175.118.700,- terealisasi sebesar Rp.127.763.000,- atau 98,65% dengan output Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

f) Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan daerah, yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan rencana anggaran sebesar Rp. 260.425.000,- terealisasi sebesar Rp.260.099.232,- atau 99,87%, dengan output Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100 %

- Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Restribusi Daerah anggaran sebesar Rp. 230.909.000,- terealisasi sebesar Rp. 203.606.400,- atau 88,18% dengan Output Periode Penagihan Rutin Tunggal Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah selama 4 Triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%
 - Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 144.173.400,- terealisasi sebesar Rp. 134.393.300,- atau 93,22 % dengan output Periode selama 4 Triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100 %.
 - Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Retribusi Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 81.275.000,- terealisasi sebesar Rp.79.105.000,- atau 97,33%, dengan output Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100 %
- g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25 Kegiatan yaitu:
- Penyusunan Standar Satuan Harga dengan rencana anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.940.000,- atau 99,90% dengan output Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH) sebanyak 50 buku SSH atau 100%.
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. Rp. 1.233.456.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.172.541.010,- atau 95,06% dengan output Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK sebanyak 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.

- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 223.695.000,- terealisasi sebesar Rp. 197.597.050,-. atau 88,33% dengan output Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA Perangkat Daerah sebanyak 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 181.633.000,- terealisasi sebesar Rp. 143.922.900,- atau 79.24% dengan output Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK sebanyak 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dan DPPA Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 183.575.500,- terealisasi sebesar Rp. 159.967.100,- atau 87,14% dengan output Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK sebanyak 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan rencana anggaran sebesar Rp.172.607.351,- terealisasi sebesar Rp. 172.547.851,- atau 99,97% dengan output Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 2 jenis buku terealisasi sebanyak 2 jenis buku atau 100%
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan rencana anggaran sebesar Rp.64.900.800,- terealisasi sebesar Rp. 64.823.000,- atau 99,98% dengan output Jumlah Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

sebanyak 5 jenis buku terealisasi sebanyak 5 jenis buku atau 100%

- Penyusunan standar kebutuhan umum dengan rencana anggaran sebesar Rp. 35.460.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.790.000,- atau 84,10% dengan output Jumlah Buku Penyusunan Standar Kebutuhan Umum sebanyak 50 buku atau 100%.
- Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 48.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.902.000,- atau 80,61% dengan output Jumlah Buku Penyusunan Pedoman RK dan DPA Perangkat Daerah sebanyak 50 buku atau 100%.
- Pembinaan/Pergeseran Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 65.280.000,- terealisasi sebesar Rp.59.395.200,- atau 90,99% dengan output Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran sebanyak 35 SKPD atau 100%.
- Peningkatan manajemen keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 254.774.400,- terealisasi sebesar Rp. 254.475.100,- atau 99,81% dengan output Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.
- Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp. 150.931.049,- terealisasi sebesar Rp. 145.416.523,- atau 96,35% dengan output Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 3 jenis buku terealisasi sebanyak 3 jenis buku atau 100%.
- Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp 212.600.000,- terealisasi sebesar

Rp. 212.572.700,- atau 99,99% dengan output Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%

- Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.742.900,- atau 88,69% dengan output Jumlah Peserta Bimtek Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan sebanyak 220 orang atau 100%
- Pelayanan validasi dan verifikasi SSPD BPHTB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 159.071.000,- terealisasi sebesar Rp. 159.053.200,- atau 99,99% dengan output periode pelayanan validasi dan verifikasi SSPD BPHTB selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.
- Penerbitan dan pendistribusian dokumen ketetapan pajak dengan rencana anggaran sebesar Rp. 189.056.000,- terealisasi sebesar Rp. 187.397.500,- atau 99,12% dengan output Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP sebanyak 3 jenis blangko terealisasi sebanyak 3 jenis blangko atau 100%
- Verifikasi lapangan dan penilaian individu data objek pajak dan zona nilai tanah PBB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 92.062.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.062.000,- atau 100% dengan output Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan sebanyak 300 lembar terealisasi terealisasi sebanyak 300 lembar atau 100%
- Pengelolaan pelaporan keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 32.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.297.000,- atau 99,99% dengan output Periode pengelolaan pelaporan keuangan selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.
- Pemetaan akun pendapatan dan belanja dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13.500.000 terealisasi sebesar

Rp. 12.799.900,- atau 94,81% dengan output Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.

- Penyusunan saldo awal laporan keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 35.314.500 terealisasi sebesar Rp. 34.313.500,- atau 97,17% dengan output Jumlah dokumen akun pendapatan dan belanja sebanyak 1 dokumen atau terealisasi sebanyak 1 dokumen 100%.
- Pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak dengan rencana anggaran sebesar Rp. 309.492.400 terealisasi sebesar Rp. 300.276.300,- atau 97,02 % dengan output Periode pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak selama 4 triwulan terealisasi terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.
- Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 30.888.100,- terealisasi sebesar Rp. 27.437.000 atau 88,83% dengan output Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA sebanyak 2 jenis buku terealisasi sebanyak 2 jenis buku atau 100%.
- Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 48.024.350,- terealisasi sebesar Rp. 35.470.100 atau 73,86% dengan output Jumlah buku rancangan PPAS dan Nota Kepakatan sebanyak 2 jenis buku terealisasi sebanyak 2 jenis buku atau 100%.
- Penyusunan Perubahan KUA dengan rencana anggaran sebesar Rp. 26.378.300,- terealisasi sebesar Rp. 22.387.900 atau 73,86% dengan output Jumlah buku KUA perubahan dan Nota kesepakatan KUA sebanyak 2 jenis buku terealisasi sebanyak 2 jenis buku atau 100%.
- Penyusunan Perubahan PPAS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 48.515.300,- terealisasi sebesar

Rp. 36.597.400 atau 75.43% dengan output Jumlah buku PPAS perubahan dan Nota Kesepakatan sebanyak 2 jenis buku terealisasi sebanyak 2 jenis buku atau 100%.

h) Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah, yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 84.895.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.241.000,- atau 99,23% dengan output Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran sebanyak 2 jenis buku terealisasi sebanyak 2 jenis buku atau 100%.
- Rekonsiliasi laporan keuangan Perangkat Daerah rencana anggaran sebesar Rp. 79.947.500.- terealisasi sebesar Rp. 79.287.500.- atau 99.17% dengan output Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

i) Program Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan daerah 13 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan buku inventaris aset dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.923.200,- atau 99,74% dengan output Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah sebanyak 3 jenis buku terealisasi sebanyak 3 jenis buku atau 100%.
- Inventarisasi sertifikasi barang / aset daerah anggaran sebesar Rp. 105.725.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.130.000 atau 98.49 % dengan output Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Verifikasi penyusunan laporan realisasi PPKD anggaran sebesar Rp. 99.896.800,- terealisasi sebesar Rp. 95.302.835,- atau 100 % dengan output Periode

Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.

- Pemeliharaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 228.865.700,- atau 99,51% dengan output Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.950.000,- atau 99,86 % dengan output Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Rekonsiliasi laporan barang milik daerah SKPD di Jajaran PEMKO Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp. 49.896.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.895.100,- dengan output Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD sebanyak 35 SKPD atau 100%.
- Rekonsiliasi aset lancar dengan SKPD di lingkungan Pemko Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.893.000,- atau 99,79 % dengan output Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar sebanyak 35 SKPD atau 100%.
- Pengelolaan aplikasi persediaan dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.964.200,- atau 99,98% dengan output Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.
- Pengelolaan aplikasi SIMDA BMD dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 158.063.776,- atau 98,79% dengan output Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.

- Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.865.000,- atau 99,70% dengan output Jumlah Buku RKBMD sebanyak 50 buku atau 100%.
 - Verifikasi dan penelitian belanja bantuan dengan anggaran sebesar Rp. 49.896.800,- terealisasi sebesar Rp. 48.824.100,- atau 97,85% dengan output selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%
 - Perancangan peraturan walikota tentang barang milik daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 40.000.000 terealisasi sebesar Rp. 39.981.000,- atau 99,95% dengan output Jumlah dokumen rancangan perwal tentang barang milik daerah sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
 - Buku status barang milik daerah rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 49.958.800.- atau 99,92% dengan output Jumlah Buku status barang milik daerah sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- j) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- Pemeliharaan jaringan SIPKD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 119.800.000,- terealisasi sebesar Rp.119.786.800,- atau 99,94% dengan output Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Juni 2020 seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah s.d Tahun 2020
Kota Lhokseumawe

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020) s/d Pebruari 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8=(7/6)	Rp 9	Rp 10=(5+7+9)	Rp 11=(10/4)
4.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.121.941.364	2.049.632.427	1.925.930.046	2.059.923.444	106,96	89.747.452	4.199.303.323	41,49
4.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.935.304	10.923.000	10.340.000	11.226.000	108,57	2.168.500	24.317.500	35,80
4.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.227.041.943	411.876.269	411.940.000	400.086.254	97,12	40.975.352	852.937.875	38,30
4.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	1.865.462.036	298.716.000	374.000.000	407.700.000	109,01	-	706.416.000	37,87
4.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	503.769.628	120.000.000	89.524.790	119.152.840	133,09	-	239.152.840	47,47
4.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.111.200	34.449.250	40.000.000	30.522.000	76,31	-	64.971.250	31,52
4.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.611.750	20.715.750	20.000.000	20.611.750	103,06	-	41.327.500	39,51
4.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	11.438.616	1.900.000	2.200.000	2.000.000	90,91	-	3.900.000	34,10
4.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	400.351.560	64.694.500	77.000.000	46.862.500	60,86	-	111.557.000	27,86
4.04.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.071.720.101	426.487.658	200.000.000	306.748.900	153,37	46.603.600	779.840.158	72,77
4.04.01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	3.663.499.226	659.870.000	700.925.256	715.013.200	102,01	-	1.374.883.200	37,53
4.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.877.089.661	965.203.560	878.740.500	1.863.605.018	212,08	14.158.300	2.842.966.878	58,29
4.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.818.922.040	-	406.300.000	769.505.780	189,39	-	769.505.780	42,31
4.04.02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	974.941.424	535.781.000	120.000.000	435.720.625	363,10	-	971.501.625	99,65
4.04.02.022.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	769.883.000	205.305.810	100.000.000	397.113.313	397,11	-	602.419.123	78,25
4.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	627.401.228	124.312.000	112.440.500	172.626.500	153,53	12.912.100	309.850.600	49,39
4.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	602.587.769	96.926.750	125.000.000	80.648.800	64,52	1.246.200	178.821.750	29,68
4.04.02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	83.354.200	2.878.000	15.000.000	7.990.000	53,27	-	10.868.000	13,04
4.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	510.510.000	-	110.000.000	206.972.790	188,16	-	-	-
4.04.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	255.255.000	-	55.000.000	103.278.619	187,78	-	-	-
4.04.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	255.255.000	-	55.000.000	103.694.171	188,53	-	-	-
4.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	185.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-
4.04.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	185.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-
4.04.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen Lakip, LKPI, IKK dan EKPOD	202.000.000	-	38.000.000	-	-	-	-	-
4.04.06.002.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran	202.000.000	-	38.000.000	-	-	-	-	-
4.04.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	10.082.120	1.612.000	1.320.000	14.672.000	1.111,52	-	16.284.000	161,51
4.04.07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENUA SKPD	10.082.120	1.612.000	1.320.000	1.500.000	113,64	-	3.112.000	30,87
4.04.07.004.	Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP SKPD	-	-	-	13.172.000	-	-	13.172.000	#DIV/0!
4.04.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
4.04.08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
4.04.15.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	1.068.392.500	284.538.200	192.500.000	289.297.198	150,28	21.515.000	573.835.398	53,71
4.04.15.014.	Verifikasi Dokumen Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	565.575.950	117.420.600	105.000.000	116.534.198	110,98	-	233.954.798	41,37
4.04.15.015.	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe	Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	100,00
4.04.15.016.	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	462.816.550	127.117.600	87.500.000	172.763.000	197,44	-	299.880.600	64,79
4.04.15.017.	Penyusunan Laporan Pengeluaran/belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Laporan Register SP2D	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04.15.018.	Penyusunan Laporan Dana Transfer	Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik	-	-	-	-	-	19.135.000	-	-
4.04.15.019.	Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Dana Otsus	-	-	-	-	-	2.380.000	-	-
4.04.16.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran penerimaan PAD	3.655.123.370	581.709.472	658.570.000	677.203.932	102,83	8.120.000	1.267.033.404	34,66
4.04.16.006.	Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	380.000.000	372.167.572	-	-	-	-	372.167.572	97,94
4.04.16.020.	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	7.200.000	7.200.000	-	-	-	5.430.000	12.630.000	175,42
4.04.16.029.	Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi	72.000.000	50.460.000	-	-	-	-	50.460.000	70,08
4.04.16.038.	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	7.500.000	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.16.045.	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	90.000.000	98.571.900	-	-	-	-	98.571.900	109,52
4.04.16.046.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42.000.000	45.810.000	-	-	-	-	45.810.000	109,07
4.04.16.050.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	909.160.684	-	200.530.000	260.099.232	129,71	-	260.099.232	28,61
4.04.16.052.	Pengalihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah	Periode Pengalihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah	1.060.451.890	-	244.844.600	203.606.400	83,16	-	203.606.400	19,20
4.04.16.053.	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Pendataan Wajib Retribusi	775.093.054	-	151.920.400	134.393.300	88,46	2.690.000	137.083.300	17,69
4.04.16.054.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode pelaporan piutang retribusi daerah	311.717.742	-	61.275.000	79.105.000	129,10	-	79.105.000	25,38
4.04.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	22.594.772.300	3.779.814.032	4.481.706.050	3.716.725.134	82,93	45.374.800	7.089.955.266	31,38
4.04.17.001.	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)	208.377.500	39.604.500	40.830.000	-	-	-	39.604.500	19,01
4.04.17.002.	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	260.000.000	55.260.000	50.000.000	59.940.000	119,88	-	115.200.000	44,31
4.04.17.003.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	174.620.000	36.451.000	34.500.000	-	-	-	36.451.000	20,87
4.04.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	5.961.067.000	885.123.190	1.349.873.500	1.172.541.010	86,86	29.684.800	2.087.349.000	35,02
4.04.17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	1.490.750.000	254.967.200	241.000.000	197.597.050	81,99	5.670.000	458.234.250	30,74
4.04.17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	1.426.550.000	192.765.700	207.000.000	143.922.900	69,53	-	336.688.600	23,60
4.04.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK	877.850.000	255.702.000	165.000.000	159.967.100	96,95	-	415.669.100	47,35
4.04.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	915.680.000	-	219.600.000	172.547.851	78,57	-	172.547.851	18,84
4.04.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	356.820.000	-	86.800.000	64.823.000	74,68	-	64.823.000	18,17
4.04.17.018.	Penyusunan Standar Kebutuhan Umum	Jumlah Buku Standart Kebutuhan Umum	-	-	-	29.790.000	-	-	-	-
4.04.17.021.	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	291.771.000	38.602.050	58.460.000	38.902.000	66,54	-	77.504.050	26,56
4.04.17.022.	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	323.663.000	55.678.906	61.180.000	59.395.200	97,08	-	115.074.106	35,55
4.04.17.023.	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	350.922.400	80.325.861	60.000.000	-	-	-	80.325.861	22,89
4.04.17.026.	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	1.130.345.000	283.584.740	230.900.000	254.475.100	110,21	-	538.059.840	47,60
4.04.17.027.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	781.182.400	204.149.185	160.428.000	145.416.523	90,64	-	349.565.708	44,75
4.04.17.028.	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	849.591.977	166.871.520	170.000.000	212.572.700	125,04	-	379.444.220	44,66
4.04.17.029.	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	267.836.400	68.400.000	50.000.000	64.742.900	129,49	10.020.000	143.162.900	53,45
4.04.17.030.	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBK	220.765.000	253.236.423	-	-	-	-	253.236.423	114,71
4.04.17.035.	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	319.156.081	-	51.082.000	-	-	-	-	-
4.04.17.038.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	540.000.000	334.565.059	-	-	-	-	334.565.059	61,96
4.04.17.039.	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	864.951.584	141.927.000	172.103.500	159.053.200	92,42	-	300.980.200	34,80
4.04.17.040.	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP	1.491.975.721	432.599.698	244.221.000	187.397.500	76,73	-	619.997.198	41,56
4.04.17.041.	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	423.792.717	-	104.062.000	92.062.000	88,47	-	92.062.000	21,72
4.04.17.046.	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	94.900.039	-	22.300.000	32.297.000	144,83	-	32.297.000	34,03
4.04.17.047.	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	59.950.780	-	13.500.000	12.799.900	94,81	-	12.799.900	21,35
4.04.17.048.	Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	154.084.628	-	35.367.000	34.313.500	97,02	-	34.313.500	22,27
4.04.17.051.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	1.511.344.873	-	371.793.000	300.276.300	80,76	-	300.276.300	19,87
4.04.17.052.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	320.752.400	-	72.688.100	27.437.000	37,75	-	27.437.000	8,55
4.04.17.053.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	365.697.400	-	83.924.350	35.470.100	42,26	-	35.470.100	9,70
4.04.17.054.	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	182.713.200	-	38.178.300	22.387.900	58,64	-	22.387.900	12,25
4.04.17.055.	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	377.661.200	-	86.915.300	36.597.400	42,11	-	36.597.400	9,69
4.04.18.	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	885.239.500	144.950.500	159.500.000	163.528.500	102,53	308.479.000	34,85	
4.04.18.002.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	446.192.320	74.977.000	80.000.000	84.241.000	105,30	-	159.218.000	35,68
4.04.18.005.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	439.047.180	69.973.500	79.500.000	79.287.500	99,73	-	149.261.000	34,00
4.04.19.	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	7.370.491.490	1.101.023.644	1.354.573.220	1.084.616.711	80,07	9.025.000	2.194.665.355	29,78
4.04.19.004.	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	1.498.424.932	26.025.000	29.923.200	29.923.200	99,74	-	55.948.200	35,09
4.04.19.008.	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah	231.552.500	10.630.000	45.000.000	104.130.000	231,40	-	114.760.000	49,56
4.04.19.009.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	413.725.000	30.000.000	90.000.000	95.302.835	105,89	-	125.302.835	30,29
4.04.19.011.	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	2.543.003.054	467.768.179	420.000.000	228.865.700	54,49	-	696.633.879	27,39
4.04.19.012.	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	184.595.410	7.991.000	35.000.000	34.950.000	99,86	-	42.941.000	23,26
4.04.19.026.	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	254.065.200	85.390.200	50.000.000	49.895.100	99,79	-	135.285.300	53,25
4.04.19.028.	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	282.384.000	63.320.000	50.000.000	49.893.000	99,79	-	113.213.000	40,09
4.04.19.030.	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	808.542.000	169.960.000	150.000.000	149.964.200	99,98	-	319.924.200	39,57
4.04.19.031.	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	117.875.000	198.979.265	150.000.000	158.063.776	105,38	-	357.043.041	43,65
4.04.19.033.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD	251.302.994	40.960.000	49.573.220	44.865.000	90,50	-	85.825.000	34,15
4.04.19.034.	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	214.514.000	-	50.000.000	48.824.100	97,65	-	48.824.100	22,76
4.04.19.035.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	171.611.200	-	40.000.000	39.981.000	99,95	-	39.981.000	23,30
4.04.19.036.	Patok / Batas Aset Daerah	Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.19.037.	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	55.000.000		5.000.000		-	-	-	-
4.04.19.038.	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	55.000.000		5.000.000		-	-	-	-
4.04.19.039.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	55.000.000		5.000.000		-	-	-	-
4.04.19.040.	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	278.868.200		65.000.000	49.958.800	76,86		49.958.800	17,91
4.04.19.041.	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	429.028.000		100.000.000		-	-	-	-
4.04.19.043.	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	55.000.000		5.000.000		-	-	-	-
4.04.19.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah	55.000.000		5.000.000		-	-	-	-
4.04.19.052.	Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah ruas jalan dan Tanah dibawah jalan	-		-	-	-	9.025.000	9.025.000	-
4.04.20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	592.194.700	105.635.000	106.700.000	119.786.800	112,27	-	225.421.800	38,07
4.04.20.008.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	592.194.700	105.635.000	106.700.000	119.786.800	112,27	-	225.421.800	38,07
			52.092.837.005	9.014.118.835	9.947.539.816	10.196.331.527	102,50	187.940.552	18.717.944.424	35,93

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dengan jelas disebutkan tugas Perangkat Daerah adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan daerah, bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

NO	Indikator	NSPK / SPM	IKK	Target RENSTRA SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)											
1.	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah			12 Bln	12 Bln	-	-	12 Bln	11 Bln	-	-	
2.	Besaran penerimaan PAD			47,50 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	35,39 Milyar	39,09 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	
3.	Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK			7 Dok	7 Dok	-	-	7 Dok	7 Dok	-	-	
4.	Opini BPK laporan keuangan daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
5.	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah			8 Dok	8 Dok	-	-	8 Dok	8 Dok	-	-	
6.	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah			-	-	64 Dok	64 Dok	-	-	64 Dok	64 Dok	
7.	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah			12 Bln	12 Bln	-	-	12 Bln	11 Bln	-	-	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
1.	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kelemahan (Weaknes)

- Kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai khususnya dalam hal pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang ada di Perangkat Daerah, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan.
- Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi

3. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
- Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- Adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan untuk terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dalam hal penggaran Pendapatan dan belanja daerah baik pada tahap penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan ;

4. Tantangan/Ancaman (Treath)

- Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;

- Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Review rancangan awal RKPK dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting. Perbandingan antara rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan dilakukan melalui seleksi program/kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas daerah. Review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2021 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2021

Nama SKPK : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					25.531.813.965	
	Keuangan				11.116.343.063	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15.611.589.865		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.160.893.512	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	1.200.000		
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11.400.251	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1.200.000		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	463.663.850	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	1.200.000		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	588 OB	399.072.727	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1.200.000		
4	Penyediaan alat tulis kantor		Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	98.594.932	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	1.200.000		
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	44.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Lhokseumawe	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	1 Dok	1.200.000		
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	25.000.000							
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	365 Eks	2.425.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10.124.757.865		
8	Penyediaan makanan dan minuman		Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	84.892.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe	Rentang waktu pembayaran gaji, tunjangan dan upah pungut pajak daerah	14 bulan	10.094.757.865		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	220.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis Buku Laporan Keuangan Semesteran	3 Jenis Buku	30.000.000		
10	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	1.800 OB	811.243.752							
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.063.276.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	286.098.600		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	485.239.685	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Lhokseumawe	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	200.000.000		
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	189.470.669	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Aplikasi Keuangan	200 Peserta	86.098.600		
3	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	110.250.000							
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	123.965.651	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.136.413.100		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	137.812.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis	15.000.000		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 Bulan	16.537.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	30 jenis	100.000.000		
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	5 Orang	48.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	49 Kali	295.000.000		
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	12 Bulan	48.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah aplikasi yang dikelola	7 Aplikasi	604.133.100		
E	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan Dokumen pelaporan keuangan	100%	50.000.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah buku laporan keuangan semesteran	3 Jenis Buku	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	7 Jenis	1.825.263.300	
F	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	1.597.200	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	10 unit	278.263.300	
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku RENJA SKPD	10 Buku	1.597.200	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	jumlah gedung kantor yang dibeli	1 gedung	1.500.000.000	
H	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bulan	232.925.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.786.557.000	
1	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe		periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	4 Triwulan	127.906.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	Jumlah penyediaan benda pos dan paket pengiriman	700 Lbr	5.000.000	
2	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas		Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	12 Bulan	105.018.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening	498.400.000	
3						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	1800 OB	893.457.000	
4						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	588 OB	389.700.000	
5						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	445.300.000	
6						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	150.000.000	
7						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	201.500.000	
8						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan pengadaan gedung kantor	5 Jenis	83.800.000	
9						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 Jenis	10.000.000	
10											
11						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Lhokseumawe	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP	5.382.572.600	
I	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Besaran penerimaan PAD	49,20 Milyar	796.869.700	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	151 Dok	2.859.546.100	
1						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	85.000.000	
2						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	78.000.000	
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak		Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	12 Bulan	235.982.463	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	34 Dok	55.000.000	
4	Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah	4 Triwulan	269.941.171	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan yang diverifikasi	34 Dok	55.000.000	
5	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah		Periode Pendataan Wajib Retribusi	4 Triwulan	208.492.241	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	34 Dok	55.000.000	
6	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah		Periode pelaporan piutang retribusi daerah	12 Bulan	82.453.825	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	34 Dok	55.000.000	
7						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Qanun APBK dan Perwal Penjabaran APBK	2 Dok	145.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Qanun Perubahan APBK dan Perwal Penjabaran Perubahan APBK	2 Dok	125.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendukung Regulasi Penganggaran Daerah	4 Dok	540.000.000	
						Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Rentang Waktu Pembinaan Penganggaran Daerah	12 Bln	1.666.546.100	
J	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	100%	4.648.546.050	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	226 Dok	1.135.700.000	
1	Penyusunan analisa standar belanja		Jumla Buku Analisa Standar (ASB)	50 Buku	43.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	150.000.000	
2	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 Buku	53.500.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen anggaran kas dan terbitnya SPD	144 Dok	130.000.000	
3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	35.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen dana perimbangan dan dana transfer lainnya	24 Dok	200.000.000	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3 Jenis Dokumen	1.349.873.500	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan	4 Dok	82.600.000	
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK		Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3 Jenis Dokumen	243.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas	24 Dok	55.700.000	
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3 Jenis Dokumen	218.500.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekap Transaksi Harian (RTH)	14 Dok	200.000.000	
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Jenis Dokumen	175.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen perbendaharaan daerah terkait pembinaan penatausahaan keuangan SKPD	4 Dok	98.000.000	
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	2 Jenis Buku	232.500.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan keuangan daerah	34 SKPD	219.400.000	
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	5 Jenis Buku	90.000.000						
10						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	80 Dok	1.267.326.500	
11	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD		Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50 Buku	61.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah jenis laporan keuangan yang akurat	4 Jenis Laporan	48.316.000	
12	Pembinaan / Pergeseran Anggaran		Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35 SKPD	64.500.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kota Lhokseumawe	Jumlah jenis laporan berita acara rekonsiliasi keuangan per bulan, triwulan dan semesteran	4 Jenis Laporan	75.000.000	
13	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rancangan	63.200.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis Buku Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran	3 Jenis Buku	171.725.200	
14	Peningkatan manajemen keuangan daerah		Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3 Dok	243.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis Buku Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	176.697.400	
15	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	165.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis Buku Rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBK	7 Jenis Buku	386.280.400	
17	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan		Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	200 Org	52.700.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 Kali	150.582.000	
18	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	56.317.903	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dok	105.000.000	
19	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4 Triwulan	186.587.468	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	65.799.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak		Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	3 Jenis Blangko	249.912.732	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah	12 Kali	75.000.000	
21	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB		Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	300 Lbr	106.528.355						
22	Pengelolaan Pelaporan Keuangan		Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	4 Triwulan	24.585.750	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Kali	120.000.000	
25	Pendaftaran, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak		Periode Pendaftaran,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	4 Triwulan	377.051.783	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Lhokseumawe	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dok	2.367.355.300	
26	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	100 Buku	82.688.100	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dok	2.367.355.300	
27	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	110 Buku	93.924.350	Penyusunan Standar Harga	Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku HSPK	50 Buku	100.000.000	
28	Penyusunan Perubahan KUA		Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	95 Buku	48.178.300	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah buku SSH	50 buku	108.000.000	
29	Penyusunan Perubahan PPAS		Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	105 Buku	96.915.300	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku RKBMD, RKPMD dan Perubahannya	110 Buku	70.000.000	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Asuransi Kendaraan, Pemeliharaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 Dok	503.955.700	
K	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	192.995.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen inventarisasi / pendataan tanah dibawah jalan dan sensus aset daerah	10 Dok	675.399.600	
1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	2 Jenis Buku	96.773.125	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen Sertifikasi Aset Daerah dan Surat Berharga Kendaraan Bermotor Milik Daerah	20 Dok	150.000.000	
2	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	96.221.875	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pengendalian Barang Milik Daerah	4 Dok	55.000.000	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen SK Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	4 Dok	100.000.000	
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD dan rekonsiliasi aset lancar	35 SKPD	170.000.000	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Laporan BMD dan Status BMD	3 Dok	85.000.000	
L	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	100 %	1.639.033.596	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah SDM Pengelolaan Barang Milik Daerah	68 Org	350.000.000	
1	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah		Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	3 Jenis Buku	33.315.094						
2	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah		Periode Inventarisasi,Sertifikasi Barang/Aset Daerah	12 Bulan	49.612.500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Lhokseumawe	Besaran Penerimaan PAD	49,20 Milyar	2.170.296.200	
3	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4 Triwulan	99.225.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Lhokseumawe	Besaran Penerimaan PAD	49,20 Milyar	2.170.296.200	
4	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12 Bulan	521.501.527	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Daerah	2 Jenis	103.783.000	
5	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	12 Bulan	38.587.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Jenis kebutuhan operasional pengelolaan pajak daerah	6 Jenis	87.846.950	
6	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	35 SKPD	55.125.000	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Objek Pajak Daerah yang Ter Update	25000 WP/OP	273.860.350	
7	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35 SKPD	55.125.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah data Objek Pajak yang dikelola dan dipelihara dalam basis data pajak daerah	53000 OP	366.440.000	
10	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Buku RKBMD	50 Buku	54.654.475	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen yang tervalidasi dan terverifikasi pelaporan pajak daerah baik yang self assesment maun officia	2500 Dok	166.046.000	
13	Patok / Batas Aset Daerah		Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	1 Paket	20.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pajak daerah	500 WP	236.810.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 tidak melakukan pengumpulan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 telah ditetapkan tema pembangunan yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan tujuh (7) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

1. penguatan ketahanan ekonomi.
2. pengembangan wilayah.
3. peningkatan SDM.
4. peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. penguatan infrastruktur.
6. pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sementara itu, Tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2021 adalah “Pemulihan Ketahanan Ekonomi dengan Fokus Pengembangan Agro Industri, Pemberdayaan UMKM, Peningkatan Ketahanan Pangan dan Optimalisasi Layanan Kesehatan” dengan Empat (4) Prioritas Pembangunan Aceh yaitu :

1. mendorong pemulihan agroindustri dan pemberdayaan UMKM.
2. peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
3. penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Guna menjaga sinergitas pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, diperlukan telaahan terhadap setiap kebijakan prioritas pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui forum Konsultasi Publik RKP Tahun

2021 telah menyepakati tema pembangunan untuk tahun 2021 yaitu “Memperkuat Kerjasama Pembangunan untuk Menciptakan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Peningkatan Daya Saing SDM” dengan Tujuh (7) Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe yaitu :

1. penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya.
2. pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata.
3. peningkatan Kualitas Pendidikan.
4. peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5. penataan Reformasi Birokrasi.
6. pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
7. peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan SKPK yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe diatas diketahui bahwa Perangkat Daerah akan mendukung prioritas ke-5 yaitu Penataan Reformasi Birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada perumusan arah kebijakan serta penetapan program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang fokus, spesifik, dan dapat dicapai.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 berdasarkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”.

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam upaya mengsucceskan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2021 telah disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Untuk mendukung optimalisasi dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk menindak lanjuti permendagri Nomor 90 Tahun 2017 dan penyesuaian Nomenklatur Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perangkat daerah sehingga terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPK dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, merencanakan 4 program, 13 kegiatan dan 79 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 25.531.813.965,- (Dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribusembilan ratus enam puluh lima rupiah). Untuk lebih jelasnya seperti terangkum dalam Tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN
PRAKIRAAN MAJU KOTA LHOKEUMAWA TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 02 00 00 05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				25.531.813.965				25.468.846.743	BPKD
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				25.531.813.965				25.468.846.743	BPKD
5. 02.	KEUANGAN				25.531.813.965				25.468.846.743	BPKD
5. 02. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	15.611.589.865	APBK	-	100%	15.615.126.154	BPKD
5. 02. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	6 Dok	7.200.000	APBK	-	7 Dok	7.920.000,00	BPKD
5. 02. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dok	1.200.000	APBK	-	2 Dok	1.320.000	BPKD
5. 02. 01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dok	1.200.000	APBK	-	1 Dok	1.320.000	BPKD
5. 02. 01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dok	1.200.000	APBK	-	1 Dok	1.320.000	BPKD
5. 02. 01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dok	1.200.000	APBK	-	1 Dok	1.320.000	BPKD
5. 02. 01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dok	1.200.000	APBK	-	1 Dok	1.320.000	BPKD
5. 02. 01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Kota Lhokseumawe	1 Dok	1.200.000	APBK	-	1 Dok	1.320.000	BPKD
5. 02. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	10.124.757.865	APBK	-	100%	11.137.233.652	BPKD
5. 02. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rentang waktu pembayaran gaji, tunjangan dan upah pungut pajak daerah	Kota Lhokseumawe	14 bulan	10.094.757.865	APBK	-	14 bulan	11.104.233.652	BPKD
5. 02. 01. 2.02. 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Jenis Buku Laporan Keuangan Semesteran	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	30.000.000	APBK	-	3 Jenis Buku	33.000.000	BPKD
5. 02. 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	286.098.600	APBK	-	100%	294.708.460	BPKD
5. 02. 01. 2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Lhokseumawe	20 Orang	200.000.000	APBK	-	20 Orang	200.000.000	BPKD
5. 02. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Aplikasi Keuangan	Kota Lhokseumawe	200 Peserta	86.098.600	APBK	-	200 Peserta	94.708.460	BPKD
5. 02. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	1.136.413.100	APBK	-	100%	1.250.054.410	BPKD
5. 02. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Kota Lhokseumawe	5 jenis	15.000.000	APBK	-	5 jenis	16.500.000	BPKD
5. 02. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	Kota Lhokseumawe	30 jenis	100.000.000	APBK	-	30 jenis	110.000.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 02. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Lhokseumawe	2667 Porsi	80.000.000	APBK	-	2920 Porsi	88.000.000	BPKD
5. 02. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak dan digandakan	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	40.000.000	APBK	-	5 Jenis	44.000.000	BPKD
5. 02. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan yang dibeli	Kota Lhokseumawe	2 jenis	2.280.000	APBK	-	2 jenis	2.508.000	BPKD
5. 02. 01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Lhokseumawe	49 Kali	295.000.000	APBK	-	34 Kali	324.500.000	BPKD
5. 02. 01. 2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	Kota Lhokseumawe	7 Aplikasi	604.133.100	APBK	-	7 Aplikasi	664.546.410	BPKD
5. 02. 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kota Lhokseumawe	7 Jenis	1.825.263.300	APBK	-	7 Jenis	470.166.932	BPKD
5. 02. 01. 2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Kota Lhokseumawe	10 unit	278.263.300	APBK	-	10 unit	306.089.630	BPKD
5. 02. 01. 2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dibeli	Kota Lhokseumawe	1 gedung	1.500.000.000	APBK	-	1 gedung	0	BPKD
5. 02. 01. 2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kota Lhokseumawe	5 jenis	47.000.000	APBK	-	5 jenis	164.077.302	BPKD
5. 02. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	1.786.557.000	APBK	-	100%	1.965.212.700	BPKD
5. 02. 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Kota Lhokseumawe	2 jenis	5.000.000	APBK	-	2 jenis	5.500.000	BPKD
5. 02. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Kota Lhokseumawe	3 Rekening	498.400.000	APBK	-	3 Rekening	548.240.000	BPKD
5. 02. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	Kota Lhokseumawe	1800 OB	893.457.000	APBK	-	1800 OB	982.802.700	BPKD
5. 02. 01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	445.300.000	APBK	-	100%	489.830.000	BPKD
5. 02. 01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (7 Unit x 12 Bulan	Kota Lhokseumawe	84 UB	150.000.000	APBK	-	84 UB	165.000.000	BPKD
5. 02. 01. 2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kota Lhokseumawe	2 Gedung	201.500.000	APBK	-	2 Gedung	221.650.000	BPKD
5. 02. 01. 2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan pengadaan gedung kantor	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	83.800.000	APBK	-	5 Jenis	92.180.000	BPKD
5. 02. 01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Lhokseumawe	1 Jenis	10.000.000	APBK	-	1 Jenis	11.000.000	BPKD
5. 02. 02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK laporan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	WTP	5.382.572.600	APBK	-	WTP	4.726.494.227	BPKD
5. 02. 02. 2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	Kota Lhokseumawe	151 Dok	2.859.546.100	APBK	-	151 Dok	1.951.165.077	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Kota Lhokseumawe	2 Dok	85.000.000	APBK	-	2 Dok	93.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Kota Lhokseumawe	2 Dok	78.000.000	APBK	-	2 Dok	85.800.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 02. 02. 2.01. 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	Kota Lhokseumawe	34 Dok	55.000.000	APBK	-	34 Dok	60.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan yang diverifikasi	Kota Lhokseumawe	34 Dok	55.000.000	APBK	-	34 Dok	60.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	Kota Lhokseumawe	34 Dok	55.000.000	APBK	-	34 Dok	60.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	Kota Lhokseumawe	34 Dok	55.000.000	APBK	-	34 Dok	60.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Qanun APBK dan Perwal Penjabaran APBK	Kota Lhokseumawe	2 Dok	145.000.000	APBK	-	2 Dok	159.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Qanun Perubahan APBK dan Perwal Penjabaran Perubahan APBK	Kota Lhokseumawe	2 Dok	125.000.000	APBK	-	2 Dok	137.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Pendukung Regulasi Penganggaran Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Dok	540.000.000	APBK	-	4 Dok	399.664.367	BPKD
5. 02. 02. 2.01. 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rentang Waktu Pembinaan Penganggaran Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bln	1.666.546.100	APBK	-	12 Bln	833.200.710	BPKD
5. 02. 02. 2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Lhokseumawe	226 Dok	1.135.700.000	APBK	-	226 Dok	1.249.270.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Dok	150.000.000	APBK	-	12 Dok	165.000.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan terbitnya SPD	Kota Lhokseumawe	144 Dok	130.000.000	APBK	-	144 Dok	143.000.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kota Lhokseumawe	24 Dok	200.000.000	APBK	-	24 Dok	220.000.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan	Kota Lhokseumawe	4 Dok	82.600.000	APBK	-	4 Dok	90.860.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFFK)	Jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas	Kota Lhokseumawe	24 Dok	55.700.000	APBK	-	24 Dok	61.270.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekap Transaksi Harian (RTH)	Kota Lhokseumawe	14 Dok	200.000.000	APBK	-	14 Dok	220.000.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen perbendaharaan daerah terkait pembinaan penatausahaan keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	4 Dok	98.000.000	APBK	-	4 Dok	107.800.000	BPKD
5. 02. 02. 2.02. 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	34 SKPD	219.400.000	APBK	-	34 SKPD	241.340.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 02. 02. 2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	80 Dok	1.267.326.500	APBK	-	80 Dok	1.394.059.150	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang akurat	Kota Lhokseumawe	4 jenis laporan	48.316.000	APBK	-	4 jenis laporan	53.147.600	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah jenis laporan berita acara rekonsiliasi keuangan per bulan, triwulan dan semesteran	Kota Lhokseumawe	4 Jenis Laporan	75.000.000	APBK	-	4 Jenis Laporan	82.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Jenis Buku Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	171.725.200	APBK	-	3 Jenis Buku	188.897.720	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Buku Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	176.697.400	APBK	-	3 Jenis Buku	194.367.140	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBK	Kota Lhokseumawe	7 Jenis Buku	386.280.400	APBK	-	7 Jenis Buku	424.908.440	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen data dan pengujian bukti memorial	Kota Lhokseumawe	60 Dok	12.926.200	APBK	-	60 Dok	14.218.820	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Kali	150.582.000	APBK	-	4 Kali	165.640.200	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	2 Dok	105.000.000	APBK	-	2 Dok	115.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dok	65.799.300	APBK	-	1 Dok	72.379.230	BPKD
5. 02. 02. 2.03. 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Kali	75.000.000	APBK	-	12 Kali	82.500.000	BPKD
5. 02. 02. 2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Lhokseumawe	272 Kali	120.000.000	APBK	-	272 Kali	132.000.000	BPKD
5. 02. 02. 2.04. 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan keuangan	Kota Lhokseumawe	272 Kali	120.000.000	APBK	-	272 Kali	132.000.000	BPKD
5. 02. 03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	64 Dok	2.367.355.300	APBK	-	64 Dok	2.638.147.227	BPKD
5. 02. 03. 2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	64 Dok	2.367.355.300	APBK	-	64 Dok	2.638.147.227	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku HSPK	Kota Lhokseumawe	50 Buku	100.000.000	APBK	-	50 Buku	115.000.000	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku SSH	Kota Lhokseumawe	50 buku	108.000.000	APBK	-	50 buku	123.800.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 02. 03. 2.01. 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD, RKPBM dan Perubahannya	Kota Lhokseumawe	110 Buku	70.000.000	APBK	-	110 Buku	82.000.000	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Asuransi Kendaraan, Pemeliharaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	20 Dok	503.955.700	APBK	-	20 Dok	559.351.270	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen inventarisasi / pendataan tanah dibawah jalan dan sensus aset daerah	Kota Lhokseumawe	10 Dok	675.399.600	APBK	-	10 Dok	747.939.560	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Sertifikasi Aset Daerah dan Surat Berharga Kendaraan Bermotor Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	20 Dok	150.000.000	APBK	-	20 Dok	170.000.000	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Dok	55.000.000	APBK	-	4 Dok	64.556.397	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen SK Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Kota Lhokseumawe	4 Dok	100.000.000	APBK	-	4 Dok	110.000.000	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD dan rekonsiliasi aset lancar	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	170.000.000	APBK	-	35 SKPD	187.000.000	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD dan Status BMD	Kota Lhokseumawe	3 Dok	85.000.000	APBK	-	3 Dok	93.500.000	BPKD
5. 02. 03. 2.01. 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	68 Org	350.000.000	APBK	-	68 Org	385.000.000	BPKD
5. 02. 04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Besaran Penerimaan PAD	Kota Lhokseumawe	49.20 Milyar	2.170.296.200	APBK	-	49.20 Milyar	2.489.079.135	BPKD
5. 02. 04. 2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Besaran Penerimaan PAD	Kota Lhokseumawe	49.20 Milyar	2.170.296.200	APBK	-	49.20 Milyar	2.489.079.135	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Jenis penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Daerah	Kota Lhokseumawe	2 Jenis	103.783.000	APBK	-	2 Jenis	114.161.300	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis kebutuhan operasional pengelolaan pajak daerah	Kota Lhokseumawe	6 Jenis	87.846.950	APBK	-	6 Jenis	96.631.645	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Objek Pajak Daerah yang Ter Update	Kota Lhokseumawe	25000 WP/OP	273.860.350	APBK	-	25000 WP/OP	351.246.385	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data Objek Pajak yang dikelola dan dipelihara dalam basis data pajak daerah	Kota Lhokseumawe	53000 OP	366.440.000	APBK	-	53000 OP	403.084.000	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa NJOP untuk dasar pengenaan PBB serta BPHTB	Kota Lhokseumawe	68 Desa	100.000.000	APBK	-	68 Desa	130.000.000	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang melakukan Kewajiban Pajak daerah	Kota Lhokseumawe	53000 WP	226.240.000	APBK	-	53000 WP	248.864.000	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang tervalidasi dan terverifikasi pelaporan pajak daerah baik yang self assesment maun officia	Kota Lhokseumawe	2500 Dok	166.046.000	APBK	-	2500 Dok	182.650.600	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis target pajak penerimaan yang direncanakan	Kota Lhokseumawe	10 Jenis pajak	245.000.000	APBK	-	10 Jenis pajak	301.253.315	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah jenis target pajak lebih bayar pajak daerah	Kota Lhokseumawe	10 jenis pajak	109.269.800	APBK	-	10 jenis pajak	120.196.780	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 02. 04. 2.01. 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pajak daerah	Kota Lhokseumawe	500 wp	236.810.100	APBK	-	500 wp	260.491.110	BPKD
5. 02. 04. 2.01. 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah jenis administrasi retribusi daerah dan penerimaan retribusi daerah	Kota Lhokseumawe	10 jenis retribusi	255.000.000	APBK	-	10 jenis retribusi	280.500.000	BPKD

BAB IV

P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Renja ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di lingkungan Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap Kepala Bidang dan Sekretaris wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 bila diperlukan.
4. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.